

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KETEPATWAKTUAN LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN KOTA LHOKSEUMAWE

Syamsidar dan Maisyuri
Program Studi Akuntansi
STIE Lhokseumawe

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Sistem pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia terhadap Kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda melalui bantuan program SPSS versi 19. Hasil uji F dalam penelitian ini diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 62,054 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai F_{tabel} dengan tingkat signifikansi 5% dan $df = n-k-1$ ($85 - 2-1= 82$) diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,11 Dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ artinya secara simultan sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci : Sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik semakin meningkat. Sehingga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdorong untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Seiring adanya tuntutan *good government governance* dan reformasi pengelolaan sektor publik yang ditandai dengan munculnya era *new public management*, dengan tiga prinsip utamanya yang berlaku secara universal yaitu profesional, transparansi, dan akuntabilitas telah mendorong adanya

usaha untuk meningkatkan kinerja dibidang pengelolaan keuangan, dengan mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik.

Pemerintah terus mewujudkan berbagai upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik (*good government governance*) antara lain perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Reformasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan APBD untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu,

informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Arfianti, 2011). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut memiliki nilai. Nilai tersebut diantaranya adalah ketepatanwaktuan.

Ketepatanwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. ketepatanwaktuan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi itu kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP, Lampiran I:par.35-40) menjelaskan bahwa agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dilihat dari pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2016, secara umum masih mempunyai kelemahan terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Dalam indikatornya menunjukkan efektivitas masih dibawah ideal, artinya masih ada target kinerja dalam pembangunan Kota Lhokseumawe yang belum tercapai sesuai dengan sasaran target. Selain itu terdapat kelemahan pada bagian bendaharawan di setiap SKPD yang belum melakukan pengamanan dan pengendalian secara maksimal, kemudian bagian keuangan setiap SKPD belum melaksanakan sistem dan

prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pembukuan dan pencatatan pada tingkat SKPD belum dilaksanakan dengan baik. Jika ditinjau dari sistem pengendalian internal, mengungkapkan bahwa masih ditemukan kelemahan dan kekurangan pada pelaksanaan APBD Kota Lhokseumawe yaitu sistem dan prosedur akuntansi yang belum diterapkan secara maksimal di bagian keuangan pada masing-masing SKPD. Kondisi SKPD Kota Lhokseumawe tersebut berkaitan erat dengan belum optimalnya informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Kondisi SKPD Kota Lhokseumawe tersebut berkaitan erat dengan belum optimalnya pengelolaan uang. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dalam rapat Paripurna yang mana anggota legeslatif kota Lhokseumawe membeberkan berbagai temuan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) walikota 2014 lalu. Bukti lemahnya pengelolaan pemerintah.

Hal tersebut menggambarkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah daerah belum dinyatakan baik, oleh karena itu perlu dilakukannya pengendalian *intern* secara rutin untuk menggambarkan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menunjukkan pencapaian hasil yang dicapai. Dalam hal ini, pelaksanaan pengendalian yang efektif dan efisien sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan yang terjadi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wawan Sukmana dan Lia Anggraini(2009) menunjukkan bahwa secara simultan pengawasan *intern* dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitian Almada Primadona(2008) menjelaskan bahwa Pengawasan *intern* secara parsial memberi pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh kedua penelitian terdahulu di atas, penulis menduga bahwa pengendalian *intern* juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Kota Lhokseumawe.

Penulis ingin mengulang kembali penelitian yang dilakukan oleh Wawan Sukmana dan Lia Anggraini dengan perbedaan kedua penelitian tersebut bahwa dalam penelitian ini penulis mengambil satu variabel yaitu pengendalian *intern* tujuannya untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini terfokus pada pengaruh pengendalian *intern* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi mengenai sistem pengendalian internal yang dilakukan pada masing-masing SKPD Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis ingin melakukan penelitian studi kasus dengan mengangkat judul "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kualitas sumber daya manusia Terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe".

B. Landasan Teori

1. Pengertian sistem pengendalian internal

Pengendalian merupakan pelaksanaan (tindakan langsung) dari perencanaan juga pelaksanaan yang memberikan umpan balik. Pengendalian

internal pemerintah yang efektif dapat membantu suatu organisasi pemerintahan menyediakan keyakinan yang memadai mengenai informasi pelaporan keuangan organisasi. Menurut Azhar Susanto (2008:95) pengendalian *intern* yaitu Suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan pegawai yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dirancang melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 05 Tahun 2008 sistem pengendalian *intern* adalah sebagai berikut : Seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur (Standar) yang telah ditetapkan, secara efektif dan efisien, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik."

Menurut Hadari Nawawi (2002: 137) pengawasan *intern* adalah Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer puncak dan atau pimpinan atau manajer unit atau satuan kerja dilingkungan organisasi dan atau unit atau satuan kerja masing-masing. Pengendalian *intern* di lingkungan sektor publik mempunyai sifat yang khusus. Organisasi pemerintah dikelola dengan cara dan nilai yang berbeda jika dibandingkan

dengan sektor privat. Karena ciri utama dalam pengelolaan kegiatan sektor publik adalah ketaatan dalam melaksanakan anggaran.

Menurut Santoyo Gondodiyoto (2009:160), unsur-unsur sistem pengendalian *intern* sangat penting karena sistem mempunyai beberapa unsur dan sifat-sifat tertentu yang dapat meningkatkan kemungkinan dapat dipercayainya data-data akuntansi serta tindakan pengamanan terhadap aktiva dan catatan perusahaan. Setiap unsur mempunyai kaitan langsung dengan tujuan pengendalian *intern* serta langkah-langkah yang dapat ditempuh perusahaan untuk memenuhinya.

2. Unsur Kota pengendalian internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang pengendalian *intern* Pemerintah terdiri atas unsur:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia.

- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko.

- a. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.
- b. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (1) Identifikasi risiko; dan (2) Analisis risiko.
- c. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan: (1) Tujuan instansi pemerintah, dan (2) Tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Undang-undang.

3. Kegiatan pengendalian.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggara kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah.
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah.

- d. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara Tertulis.
- e. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan komunikasi

Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus-menerus.

5. Pemantauan pengendalian intern.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

3. Perencanaan dan Pengawasan

Pada dasarnya perencanaan dan pengawasan *intern* terdiri dari lima tahapan aktivitas, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan tujuan dasar dan sasaran

Siklus manajemen (perencanaan dan pengendalian) dimulai dengan tahapan aktivitas perencanaan tujuan dasar dan sasaran. Pemerintah daerah umumnya menetapkan tujuan dasar dalam rumusan yang luas dan jangka panjang yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sasaran dirumuskan dalam format yang lebih fokus dan mengarahkan pada bidang-bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat, misalnya kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Tujuan dasar dan sasaran berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan yang bersifat teknis (perencanaan operasional) (Abdul Halim, 2007:30).

2. Perencanaan Operasional

Tahapan ini merupakan penjabaran operasional dari tujuan dasar dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik. Perencanaan operasional pada umumnya merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berikut target kinerja yang akan dicapai. Perencanaan operasional memuat alternative program dan kegiatan yang akan dicapai. Perencanaan operasional memuat tujuan dasar dan sasaran yang diinginkan. Perencanaan operasional dirumuskan dalam jangka pendek selanjutnya diidentifikasi dan diekspresikan dalam ukuran datuan uang pada tahap penganggaran (Abdul Halim, 2007:30)

3. Penganggaran

Proses penyusunan anggaran merupakan aktivitas yang memiliki arti dan peranan penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian. Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dari aktifitas dan target kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber daya ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam bentuk satuan uang. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Abdul Halim, 2007:31).

4. Pengendalian dan Pengukuran

Salah satu fungsi anggaran adalah sebagai alat untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu organisasi yang menunjukkan hubungan input dan output. Input dalam anggaran dinyatakan dalam bentuk pengeluaran atau belanja yang menunjukkan batas maksimum jumlah uang yang akan diperoleh dari estimasi hasil minimal secara rasional dapat dicapai (Abdul Halim, 2007:31).

Pengawasan dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya. Dalam konteks pengeluaran daerah, pengendalian dimaksudkan untuk memastikan apakah: (a) Jumlah realisasi pengeluaran atau belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan; dan (b) Tingkat kegiatan yang direncanakan dapat dicapai.

Pengukuran adalah aktivitas pencatatan realisasi pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar perbandingan dengan anggaran dalam aktivitas pengendalian.

5. Pelaporan, Analisis dan Umpan Balik

Penyusunan laporan memuat jumlah pendapatan dan belanja yang dianggarkan beserta realisasinya, dan selisih atau perbedaan antara yang direncanakan dengan yang terealisasi. Selisih tersebut dianalisis untuk mengetahui penyebab terjadinya. Hasil analisis sebagai dasar untuk memberikan alternatif umpan balik untuk tahapan aktivitas sebelumnya dalam siklus perencanaan dan pengendalian meliputi revisi perencanaan operasional, revisi anggaran dan/atau modifikasi terhadap tujuan dasar dan sasaran (Abdul Halim, 2007:31).

Anggaran sendiri mempunyai beberapa fungsi penting. Antony dan Govindarajan (2003) serta Morse, Davis dan Hartgraves (2003) yang dikutip oleh Abdul Halim (2007:166) menyebutkan fungsi anggaran sebagai:

- a. Penyelarasan terhadap rencana strategi
- b. Alat koordinasi
- c. Pembagian tanggung jawab
- d. Dasar evaluasi kinerja

6. Susunan dan Komponen Anggaran

Anggaran (*master budget*) dapat dibagi menjadi 2 komponen (Horngren, Sundern and Stratton, 2002), yaitu anggaran

operasi (*Operating Budget*) dan anggaran keuangan (*Financial Budget*). Anggaran operasi fokus pada laporan laba rugi dan pendukungnya, oleh karenanya disusun sedemikian rupa sehingga memperlihatkan target-target pendapatan dan perkiraan biaya-biaya dalam periode mendatang. Sedangkan anggaran keuangan lebih berfokus pada dampak anggaran operasi terhadap kas, sehingga susunannya menunjukkan anggaran kas (kas masuk dan kas keluar), anggaran modal (*Capital Budget*) dan perkiraan neraca (*budget balance sheet*) (Abdul Halim, 2007:166).

- a. Anggaran Daerah; Arti penting anggaran daerah dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini: (1) Anggaran merupakan alat bagi pemda untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan (2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*Scarcity of resources*), pilihan (*choice*) dan *trade offs*.

b. Struktur Anggaran Daerah;

- 1) Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah yang terdiri dari (a) pendapatan

asli daerah;(b) dana perimbangan; dan (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- 2) Belanja Daerah adalah Semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah seperti ; (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang dan Jasa; (c) Belanja Modal; (d) Bunga; (e) Subsidi; (f) Hibah; (g) Bantuan sosial; (h) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan; dan (i) Belanja Tidak Terduga.
- 3) Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, seperti penerimaan dan pengeluaran.

C. Metodologi Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan instrument angket. Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai pengaruh pengendalian *intern* terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe. Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk memberikan respons sesuai dengan permintaan penulis. Adapun angket tersebut berisi butir-butir pernyataan mengenai pengendalian *intern* dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda melalui bantuan program SPSS versi 19. Adapun data yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu pengaruh sistem pengendalian internal terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintah Kota Lhokseumawe. Bentuk formula regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan

β_0 = Konstanta

β = Koefesien regresi

X1 = Sistem pengendalian internal

X2 = Kualitas sumber daya manusia

e = Nilai kesalahan (*error*)

D. Hasil Penelitian

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

1) Uji Validitas

Suatu koesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk nilai kritis dalam penelitian ini

adalah 0,3. Adapun hasil uji validitas internal pemerintah (X_1) seperti pada untuk variabel sistem pengendalian tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.1
Uji validitas Mengenai Sistem Pengendalian internal Pemerintah (X_1)

No.	No. Kuesioner	r-hitung	Nilai Kritis	Validitas
1	1	0,471	0,3	Valid
2	2	0,600	0,3	Valid
3	3	0,552	0,3	Valid
4	4	0,654	0,3	Valid
5	5	0,795	0,3	Valid
6	6	0,597	0,3	Valid

Sumber : *Data diolah, 2016*

Tabel 4.1 di atas, dari 6 butir pernyataan dinyatakan valid kuesioner mengenai Sistem Pengendalian internal Pemerintah (X_1) yang dibagikan kepada responden pada Pemerintah Kota Lhokseumawe, semua karena $r_{hitung} >$ nilai kritis.

Hasil uji validitas untuk variabel kualitas sumber daya manusia (X_2) seperti pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Uji validitas Mengenai Kualitas Sumber Daya Manusia (X_2)

No.	No. Kuesioner	r-hitung	Nilai Kritis	Validitas
1	1	0,539	0,3	Valid
2	2	0,638	0,3	Valid
3	3	0,514	0,3	Valid
4	4	0,553	0,3	Valid
5	5	0,692	0,3	Valid
6	6	0,542	0,3	Valid

Sumber : *Data diolah, 2016*

Dari 6 kuesioner mengenai kualitas sumber daya manusia (X_2) yang dibagikan kepada responden pada Kota Lhokseumawe, semua butir pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} >$ nilai kritis.

Hasil uji validitas mengenai ketepatanwaktuan laporan keuangan (Y) seperti terlihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Uji validitas Mengenai Ketepatanwaktuan
Laporan Keuangan (Y)

No.	No. Kuesioner	r-hitung	Nilai Kritis	Validitas
1	1	0,600	0,3	Valid
2	2	0,736	0,3	Valid
3	3	0,475	0,3	Valid
4	4	0,803	0,3	Valid
5	5	0,397	0,3	Valid
6	6	0,474	0,3	Valid
7	7	0,517	0,3	Valid
8	8	0,742	0,3	Valid
9	9	0,572	0,3	Valid
10	10	0,762	0,3	Valid

Sumber : *Data diolah, 2016*

Tabel 4.3 di atas, dari 10 kuesioner untuk variabel ketepatanwaktuan laporan keuangan (Y) yang dibagikan kepada responden pada SKPD pemerintah Kota Lhokseumawe, semua butir pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} >$ nilai kritis.

2) Uji Reliabilitas

Untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS versi 16. Adapun hasil uji reliabilitas untuk variabel X_1 , X_2 dan variabel Y seperti terlihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Uji Reliabilitas

No	Variabel	Jumlah Responden	Butir Pernyataan	Cronbach's Alpha	Nilai Alpha
1.	Sistem Pengendalian internal (X_1)	90	6	0,677	0,60
2.	Kualitas sumber daya manusia (X_2)	90	6	0,656	0,60
3.	ketepatanwaktuan laporan keuangan (Y)	90	10	0,811	0,60

Sumber : *Data diolah, 2016*

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, tingkat reliabilitas dari tanggapan responden terhadap kuesioner yang dibagikan kepada responden pada SKPD pemerintah Kota Lhokseumawe yaitu: untuk variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X_1) sebesar $0,677 > 0,60$, kualitas sumber daya manusia (X_2) sebesar $0,656 > 0,60$ dan variabel ketepatanwaktuan laporan keuangan (Y) yaitu sebesar $0,811 > 0,60$. Dengan demikian hasil uji reliabilitas untuk semua variabel adalah reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas diuji dengan statistik non parametik yaitu uji *Kolmogorof Smirnov* (K-S), dengan kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada besaran nilai *Kolmogorof Smirnov* (K-S) Z dan *Asymp Sig* (2-tailed), variabel dinyatakan terdistribusi secara normal jika nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$ pada signifikansi 95% .

Hasil uji normalitas mengenai sistem pengendalian internal pemerintah (X_1), kualitas sumber daya manusia (X_2) dan ketepatanwaktuan laporan keuangan (Y) dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Uji Normalitas Data

No	Nama Variabel	Asym. Sig (p-value)	Kondisi	Keterangan Distribusi Data
1.	Sistem Pengendalian internal (X_1)	0,068	$P > 0,05$	Normal
2.	Kualitas sumber daya manusia (X_2)	0,063	$P > 0,05$	Normal
3.	ketepatanwaktuan laporan keuangan (Y)	0,365	$P > 0,05$	Normal

Sumber : *Data diolah, 2016*

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa probabilitas (sig) dari nilai sistem pengendalian internal pemerintah (X_1) yaitu $0,068 > 0,05$, kualitas sumber daya manusia (X_2) $0,063 > 0,05$ dan ketepatanwaktuan laporan keuangan (Y) yaitu $0,365 > 0,05$. Jadi, dapat disimpulkan semua variabel yang diuji terbukti berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan nilai *tolerance* dan VIF (*Varian Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka disimpulkan terjadi multikolinieritas atau sebaliknya jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji

multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sistem Pengendalian internal (X_1)	0,680	1.470
Kualitas sumber daya manusia (X_2)	0,680	1.470

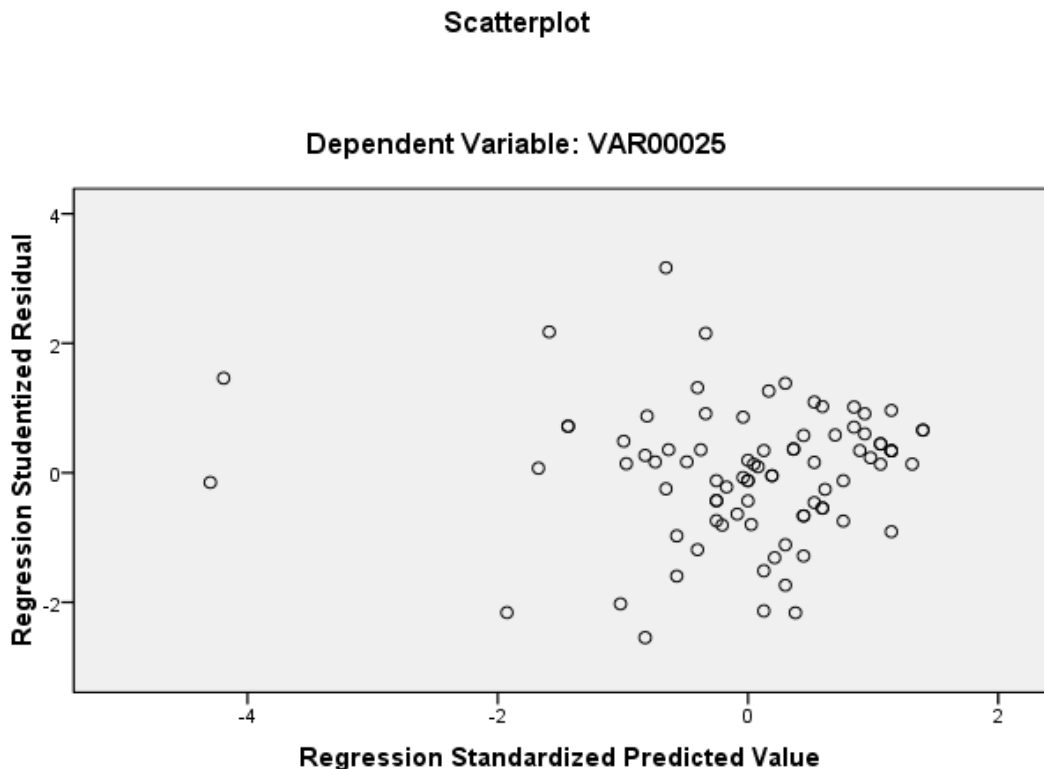
Sumber : *Data diolah, 2016*

Hasil analisis yang disajikan dalam Tabel 4.10 di atas, terlihat nilai *tolerance* dan nilai VIF menunjukkan bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10 (sistem pengendalian internal pemerintah (X_1) 0,680 dan kualitas sumber daya manusia (X_2) 0,680). Sementara nilai *tolerance* juga menunjukkan semua variabel bebas (sistem pengendalian internal pemerintah (X_1) 1,470 dan kualitas sumber daya manusia (X_2) 1,470). Hasil ini menandakan bahwa model regresi yang dihasilkan tidak terjadi multikolinieritas dan baik untuk digunakan.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji ini muncul apabila nilai kesalahan atau residual dari model yang dianalisis tidak memiliki *varian* yang konstan dari suatu observasi. Konsekuensi adanya heterokedastisitas dalam model regresi adalah *estimator*. Grafik *scatter plot* dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot*. Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, terlihat hasil pengujian heterokedastisitas mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe, tidak ada pola yang jelas, serta titik titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hasil penelitian dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Analisis Data

Teknik analisis data mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe yang dirumuskan dalam fungsi regresi linear berganda. Hasil uji regresi linear berganda seperti berikut:

Tabel 4.6
Uji Regresi Linear berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t _{tabel}	t _{hitung}	Sig.
		B	Std. Error			
1	Constant	0,235	0,378	1,66298	0,621	0,536
	Sistem pengendalian interna (X ₁)	0,737	0,094	1,66298	7,841	0,000
	Kualitas sumber daya manusia (X ₂)	0,199	0,095	1,66298	2,094	0,039
R = 0,776 = 77,6%				F _{hitung} = 62,054		
R ² = 0,602 = 60,2%				F _{tabel} = 3,11		
Adjusted R ² = 0,592 = 59,2%				Sig F = 0,000		

a. Dependent Variable: Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, maka diketahui persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = 0,235 + 0,737X_1 + 0,199X_2 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstan sebesar 0,235 artinya jika sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas sumber daya manusia dianggap konstan, maka nilai ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe meningkat sebesar 2,35%
2. Koefisien sistem pengendalian internal pemerintah (X₁) sebesar 0,737, artinya jika nilai sistem pengendalian internal pemerintah meningkat 1%, maka nilai ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintahan Kota

Lhokseumawe meningkat sebesar 0,737.

3. Koefisien kualitas sumber daya manusia (X₂) sebesar 0,199, artinya jika kualitas sumber daya manusia meningkat 1%, maka nilai ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe meningkat sebesar 0,199.

E. Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel *dependen* dengan variabel *independen*.

Berdasarkan hasil penelitian, koefisien korelasi (R) sebesar 0,776 (77,6%) artinya sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas sumber daya manusia mempunyai hubungan yang kuat dengan ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe. Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,592 (59,2%) artinya sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas sumber daya manusia memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe sebesar 59,2%. Sedangkan sisanya 50,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini seperti kinerja pemerintah, pengendalian internal dan lain-lain.

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji simultan (uji F) dan dan uji parsial (uji t) gunanya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun secara simultan. Untuk pengujian hipotesis, penulis menggunakan analisis regresi berganda.

1) Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-t yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$). Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) mengenai

pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe yang diperoleh hasil uji hipotesis sebagai berikut:

1. Variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X_1) diperoleh t_{hitung} sebesar 7,841 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 dan diketahui t_{tabel} sebesar 1,66298. Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe.
2. Variabel kualitas sumber daya manusia (X_2) diperoleh t_{hitung} sebesar 2,094 dengan tingkat signifikan sebesar 0,039 dan diketahui t_{tabel} sebesar 1,66298. Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe.

2) Uji Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%. Untuk menguji signifikansi hubungan variabel independen dengan variabel dependen secara simultan, maka digunakan uji F.

Hasil uji F dalam penelitian ini diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 62,054 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Sedangkan nilai F_{tabel} dengan tingkat

signifikan 5% dan $df = n-k-1$ ($85 - 2 - 1 = 82$) diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,11 Dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ artinya secara simultan sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe.
2. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe.
3. Sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe.

G. Daftar Pustaka

- Abdul Halim.(2007). Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.Jurnal Akuntansi.
- Almanda Primadona. (2008). Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Penelitian pada Pemerintah Kota Bandung). Jurnal: Akutansi.
- Azhar Susanto.(2008). Sistem Informasi Akuntansi.Jakarta :Lingga Jaya.
- Boynton, William C. dan Walter G Kell. (2006). *Modern Auditing*.Sixth Edition.Singapore: John Wiley & Sons Inc.
- HadariNawawi.(2010).Metode penelitian bidang sosial. Yogyakarta: Gajah Mada.University press.
- Horngren, Sundern and Stratton. (2002). *Budgeting: Pedoman lengkap langkah-langkah penganggaran*.Alih Bahasa, Jakarta: Erlangga.
- ImamGhozali.(2005).Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian.(2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Indriyo Gitosudarmo dan Basri.(2002). Manajemen Keuangan.Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
- Iqbal Hasan. (2002). Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya. Bogor selatan Ghalia Indonesia.
- IrhamFahmi.(2010). Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Mahmudi.(2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik.Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

- Mardiasmo.(2002).Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah.Vol.2 No.1 Mei 2006.
- Muslich. (2000). Manajemen Keuangan Modern: Analisis, Perencanaan, dan Kebijakan.Jakarta: Bumi Aksara Bekerjasama dengan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mulyadi. (2008). Sistem Akuntansi, Jakarta: Salemba Empat.
- Peradaban Aceh. (2012). <http://peradabanaceh2008.blogspot.com/2012/07/bpk-berikan-wdp-untuk-laporan-keuangan>. diakses 20 April 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Santoyo Gondodiyoto.(2009). Pengelolaan Fungsi Audit Sistem Informasi. Jakarta: Nitra Wacana Media.
- Singgih Santoso.(2002).Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik.Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono.(2007).Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Cet. XIV. Bandung:Alfabeta.
- Sri Mifti, Nugroho Budi Lestario dan Anacostia Kowanda.(2009). Pengawasan Internal dan Kinerja (Suatu Kajian di Kantor Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri), Jurnal: Ekonomi, No. 3 Vol. 14, Agustus 2009.
- Suryadi Prawirosentono. (2000). Manajemen perasi Analisis dan Studi Kasus. Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sydney Siegel dan Jhon N. Castelan. (2004:199).Nonparametic for the Behavioral Science.Second Edition.McGraw: Hill International Edition Singapore.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. (2005). Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia WidiasaranaIndonesia.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wawan Sukmana dan Lia Anggraini. (2009). Pengaruh Pengawasan intern dan pelaksanaan Sistem Akutansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada satuan Perangkat kerja Daerah Kota Tasikmalaya). Jurnal: Akutansi, Vol. 4 No. 1, 2009.
- Wulan Ariani dan RatuDwi.(2008). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok.Depok.
- ZakiBaridwan. (2001). Intermedite Accounting.Yogyakarta: BPFE.